

## KAJIAN TENTANG DANA DESA DI KABUPATEN BATANG

Retno Dwi Irianto, Siti Ismuzaroh, Sigit Prasetyo dan Ikfi Maryama Ulfa

Dewan Riset Daerah Kabupaten Batang

### SARI

Dana desa diharapkan mampu membuat desa di Indonesia lebih maju dan sejahtera. Jumlah dana yang besar membuat sebagian aparatur desa terkadang kesulitan dalam hal pengelolaan, apalagi dalam hal pertanggungjawaban. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan desa agar terjadi pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem dan tantangan, serta kesiapan aparatur desa dalam mengelola dana desa.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di 5 desa di Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa problem dan tantangan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Batang adalah keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah. Kesiapan aparatur desa pada dasarnya sudah siap dengan adanya program dana desa, ditunjukkan dengan kepala desa mempersiapkan atau menyediakan staf yang menguasai teknologi informasi untuk mengelola dana desa.

Saran, bagi pemerintah desa, terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa sesuai dengan misi dan harapan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa. Perubahan paradigma mengenai perilaku dan pola pikir bagi setiap aparatur desa secara terus berkelanjutan dari pamong desa menjadi pelayan publik/masyarakat desa. Bagi pemerintah kabupaten, menyediakan tenaga pendamping desa yang profesional dan memadai sesuai jumlah desa, untuk mendorong percepatan alih teknologi dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Terus mengintensifkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur desa secara komprehensif dan berkelanjutan dengan substansi materi yang tepat sasaran untuk pembenahan dan peningkatan tata kelola dana desa.

**Kata Kunci :** Dana Desa, Problem dan Tantangan, Kesiapan Aparatur Desa.

### ABSTRACT

*Village fund is expected to make villages in Indonesia more advanced and prosperous. Sometimes, the large amount of funds make some of the village apparatus difficult in managing moreover in giving responsibility. Consequently, the synergy between district and village government is required in order to make equitable development happen. The purpose of this study is to find out the problem and challenge, and also readiness of village apparatus in managing village funds.*

*The approach used in this study was qualitative approach. The research locations were 5 villages in Batang Regency. The data was collected through observation, interview, and documentation.*

*The result showed that the problem and challenge in managing village fund in Batang Regency was the lack of human resources which means the quality of village apparatus was low. Village apparatus was basically ready for the village fund program. The readiness was proved by the village chief which provided the staffs who master information technology to manage village fund.*

*Suggestion for village government is to improve capacity of village apparatus in order to improve the quality of village fund management based on the government's mission and expectation to village fund management. Besides, there should be a paradigm shift in behaviour and mindset for every village apparatus, from village government become public/ villagers servant. For district government, it is expected to provide professional escort personnel which is sufficient based on the number of villages to encourage the acceleration of technology transfer and improve village fund management. Beside that, the district government is also expected to organize training for village apparatus with material which is appropriate for correction and improvement of village fund management comprehensively and continuously.*

**Keywords :** Village Fund, Problem and Challenge, Readiness of the Village Apparatus.

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Kini pemerintah sedang gencar dalam upaya pembangunan nasional dengan fokus pemerataan pembangunan yakni salah satunya melalui penguatan desa. Paradigma baru di era pemerintahan saat ini bahwa desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi subjek pembangunan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kedudukan desa semakin tegas. Aturan dibuat lebih spesifik agar peran desa lebih optimal. Beberapa hal yang perlu dicatat dari diberlakukannya aturan tersebut di antaranya adalah desa memiliki visi dan kewenangan yang luas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Konsekuensi dari besarnya kewenangan tersebut adalah anggaran yang diberikan juga bertambah jika dibandingkan dengan sebelum disahkannya undang-undang tersebut.

Besarnya jumlah dana untuk desa diharapkan mampu membuat desa-desa di Indonesia lebih maju dan sejahtera karena desa adalah subjek pembangunan. Dikemukakan oleh Hoesada dalam Ismail, dkk (2016:325), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekadar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan. Selain itu, dengan adanya dana desa dengan jumlah yang

besar tersebut juga dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan pada masyarakat desa itu sendiri.

Dana desa yang besar membuat aparatur desa terkadang kesulitan dalam hal pengelolaannya. Apalagi dalam hal pengadministrasian atau pertanggungjawaban, desa masih sering kesulitan jika harus berurusan dengan masalah tersebut. Perlu kesiapan aparatur desa dengan besarnya dana yang diberikan apalagi dana tersebut tidak hanya sekadar diberikan, tetapi juga harus ada tanggung jawab dari yang sudah diberikan tersebut. Program yang dilaksanakan tidak hanya sebagai sekadar proyek, akan tetapi terdapat manfaat nyata bagi masyarakat yang akhirnya membawa dampak kesejahteraan pada desa-desa di Indonesia. Jangan sampai karena ketidaktahuan pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan dana desa akan terganggu dan justru akan membawa aparatur desa ke arah mal-administrasi hingga korupsi. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan bimbingan juga dapat mengakibatkan ketidaktahuan aparatur desa tentang bagaimana mengelola dana desa tersebut.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa yang ada. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut tentunya sedikit banyak dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan khususnya di desa masing-masing. Pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota harus senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada aparatur desa guna mendukung kebijakan tersebut yang pada akhirnya berjalannya pemerataan pembangunan di daerah.

Termasuk desa-desa di Kabupaten Batang, setelah disahkannya undang-

undang desa tersebut aparatur desa di Kabupaten Batang harus siap dalam mengelola dana desa tersebut. Harus terdapat sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan desa agar terjadi pemerataan pembangunan khususnya di Kabupaten Batang. Pemerintah kabupaten/kota dan desa harus berjalan beriringan, bersinergi, dan mempunyai visi yang sama agar terjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Batang

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) desa di Kabupaten Batang. Fokus penelitian ini adalah: (1) problem dan tantangan pelaksanaan dana desa, dengan indikator: (a) Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa; dan (b) Regulasi baru dengan anggaran besar; (2) kesiapan aparatur desa dalam mengelola dana desa, dengan indikator: (a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa; dan (b) Sosialisasi dan bimbingan pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Problem dan Tantangan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Batang**

Tidak dapat dipungkiri bahwa program dana desa adalah sesuatu yang baru bagi pemerintah desa. Hal tersebut adalah salah satu bentuk penghargaan negara kepada desa-desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifatnya yang menyeluruh dan nasional membuat program dana desa disertai dengan regulasi yang cukup ketat dan rumit, khususnya bagi pemerintah desa.

Program baru, regulasi baru, dan seperangkatnya tentu terdapat permasalahan dari program dana desa tersebut. Apalagi gambaran aparatur desa selama ini yang masih lemah dalam hal sumber daya manusia. Peneliti pun melakukan penelitian pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Batang terkait dengan problem dan tantangan pelaksanaan dana desa guna menjembatani permasalahan yang timbul dari program dana desa tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa problem atau masalah yang dihadapi pemerintah desa sebagian besar adalah keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah. Masih sedikitnya aparatur desa yang ‘melek’ teknologi sehingga mengakibatkan beberapa aparatur desa harus merangkap pekerjaan. Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pengadministrasian atau laporan pertanggungjawaban menjadi kendala dalam pelaksanaan program dana desa tersebut.

Adapun kendala terkait penyaluran dana desa sampai dengan saat ini adalah waktu pencairan dana tidak dilakukan pada awal tahun, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Wonotunggal, Bapak Rohani sebagai berikut:

“Kendala penyaluran dana desa adalah pencairannya yang tidak awal tahun sehingga antara pelaksanaan pembangunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban saling kejar-kejaran/tumpang tindih, sehingga desa selalu dikejar-kejar laporan pertanggungjawaban.”

Problematika di atas adalah gambaran kecil dari pelaksanaan dana desa di Kabupaten Batang. Peneliti menemukan dampak positif dari adanya problematika

tersebut di antaranya terjalin koordinasi dan tukar ilmu antara aparat desa dengan pendamping desa, adanya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah desa dengan warganya, dan pemerintah desa lebih solid karena mengemban tanggung jawab yang besar, serta adanya tukar pikiran dengan desa di sekitarnya kemudian membentuk forum kerja sekretaris desa dan bendahara desa seperti yang terjadi di Desa Tersono.

Setelah mengetahui problematika yang dihadapi oleh pemerintah desa, Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Faktanya, saat ini perkembangan teknologi telah berkembang pesat, segala sesuatu menggunakan teknologi dan selalu diperbarui. Hasil penelitian terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa mayoritas adalah semua pengolahan data menggunakan perangkat komputer dan berbasis teknologi informasi, walaupun di sisi lain pemerintah desa cukup terbantu dengan adanya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Adapun satu informan mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi adalah dalam menyusun RAB dan gambar kerja secara tepat, hasil pekerjaan sesuai rencana kerja/rencana kerja harus matang, dan penggalan potensi dan gagasan harus sesuai dengan kemauan masyarakat dan sudah tertuang dalam RPJMDes.

Kemudian terkait dengan sejauh mana pemerintah desa memahami pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah desa selalu mengikuti regulasi yang ada agar dana desa dapat dilaksanakan dengan baik dan berkoordinasi dengan kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian diperoleh bahwa pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam hal administrasi pelaporan. Adanya bentuk laporan pertanggungjawaban yang masih belum sederhana, banyaknya pengulangan laporan atau isi sehingga menimbulkan kurang efisiensi waktu dan pembengkakan pada belanja alat tulis kantor. Walau pun pada dasarnya dengan adanya Siskeudes pemerintah desa sudah terbantu, akan tetapi sumber daya manusia yang dimiliki dan mumpuni terbatas sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat optimal karena terdapat rangkap pekerjaan dan sebagainya. Selain itu, pencairan dana dilakukan tidak pada awal tahun sehingga tenaga administrasi selalu dikejar dengan syarat pengajuan pencairan, pelaksanaan pembangunan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Desa-desanya yang notabene berada di bawah pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) tentu mendapat perhatian khusus terlebih dengan adanya dana desa. Peneliti menggali informasi terkait dengan sejauh mana intensitas pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dalam pembinaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Batang. Hasil penelitian diperoleh bahwa pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) sudah baik dalam pelaksanaan pembinaan dengan memberikan bantuan tenaga pendamping ke desa. Terdapat fokus yang harus ditingkatkan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Wonotunggal, Bapak Rohani sebagai berikut:

“Intensitas pemerintah dalam pembinaan dana desa sudah cukup

bagus namun alangkah baiknya apabila pendampingan pemerintah dilakukan secara intens baik dalam pelaksanaan pembangunan dan pembuatan laporan sehingga periodisasinya terkontrol dan terpantau, harapannya dalam pembuatan SPJ nya tidak salah dan menghemat waktu.”

Lebih daripada itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang sudah sangat kooperatif apabila ada kendala dan selalu memberi solusi dan arahan ke desa.

Roh pelaksanaan dana desa adalah swakelola, masyarakat harus terlibat aktif sehingga perekonomian masyarakat akan lebih baik. Peneliti juga mencoba menggali informasi terkait sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, dan hasil penelitian diperoleh bahwa masyarakat sudah terlibat aktif dalam pelaksanaan dana desa. Diungkapkan oleh Kepala Desa Subah, Bapak Kisriyanto sebagai berikut:

“Bersama-sama masyarakat ikut mengawal dan ikut mengawasi jalannya pemanfaatan dana desa, memberdayakan tenaga (pekerja) lokal, dan ikut mengusulkan rencana pemanfaatan dana desa.”

Kemudian oleh Kepala Desa Wonotunggal, Bapak Rohani sebagai berikut:

“Sangat besar baik dari pemberdayaan gotong royong dan pemanfaatan dari tenaga kerjanya/padat karya, masyarakat juga banyak membantu dengan swadaya.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa problem dan tantangan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Batang adalah keterbatasan sumber daya manusia yaitu

kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah. Masih sedikitnya aparatur desa yang ‘melek’ teknologi sehingga mengakibatkan beberapa aparatur desa harus merangkap pekerjaan. Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pengadministrasian atau laporan pertanggungjawaban menjadi kendala dalam pelaksanaan program dana desa tersebut, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semua pengolahan data menggunakan perangkat komputer dan berbasis teknologi informasi, walaupun di sisi lain pemerintah desa cukup terbantu dengan adanya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

### **Kesiapan Aparatur Desa di Kabupaten Batang Dalam Mengelola Dana Desa**

Data yang diperoleh bahwa rata-rata desa di Kabupaten Batang mendapatkan dana desa sebesar lebih dari Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Dana tersebut tidaklah sedikit, tetapi dalam fakta yang diperoleh bahwa dana desa yang digelontorkan sejumlah tersebut dirasa masih kurang. Pada dasarnya memang target yang dipasang pemerintah untuk desa di seluruh Indonesia adalah kurang lebih satu milyar rupiah. Pertanyaannya adalah dapatkah pemerintah desa mengelola dana tersebut? Dapatkah aparatur desa membuat laporan pertanggungjawabannya dengan segala problematika yang ada? Dan lain sebagainya. Aparatur desa adalah kunci dari program dana desa. Semakin kompeten aparat desa yang ada, maka akan semakin cepat pembangunan desa terjadi.

Hasil penelitian terkait dengan kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan dana desa diperoleh bahwa aparatur desa sudah siap dengan adanya program dana desa, ditunjukkan dengan kepala desa mempersiapkan atau menyediakan staf

yang menguasai teknologi informasi untuk mengelola dana desa. Adapun program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa terus dilakukan guna kelancaran pelaksanaan dana desa. Di antaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur desa dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Ungkap Kepala Desa Reban, Bapak Didiek Sutamaji sebagai berikut:

“Tiap tahun kita selalu menyelenggarakan bintek siskeudes bagi aparat desa, Pemkab juga mengadakan sosialisasi terkait program dana desa.”

Kepala Desa Wonotunggal, Bapak Rohani mengungkapkan strateginya dalam mengatasi keterbatasan SDM aparatur desa guna mendukung dan kelancaran pelaksanaan dana desa adalah dengan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan dana desa, menjadi anggota forum tenaga administrasi, dan konsultasi dengan pendamping desa.

Peneliti mencoba menggali lebih jauh terkait pelaksanaan dana desa di desa masing-masing. Fakta diperoleh bahwa secara keseluruhan kegiatan yang didanai dari dana desa dilaksanakan dengan swakelola, baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dikerjakan secara mandiri dengan melibatkan dinas terkait. Dalam pelaksanaan proyek di lapangan juga menggunakan pekerja dari desa atau masyarakat sekitar, dengan begitu akan timbul perputaran uang di desa yang pada akhirnya akan mensejahterakan desa tersebut.

Kemudian terkait dengan bagaimana pengalokasian dana desa ke masing-masing dusun/Rukun Tetangga/Rukun Warga di desa masing-masing adalah dengan skala prioritas dan diselarskan dengan RPJMDes. Diungkapkan oleh

Kepala Desa Pasekaran, Bapak Niti Suwito sebagai berikut:

“Sistem pengalokasian dana desa ke masing-masing dusun kami lakukan dengan skala prioritas karena belum tentu semua usulan dari masing-masing RT maupun RW bisa dilaksanakan dengan biaya dana desa.”

Sehubungan dengan hal di atas, skala prioritas penggunaan dana desa mayoritas adalah untuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Nampaknya pemerintah desa sudah paham betul bagaimana dana desa dilaksanakan agar terjadi perputaran uang di desanya dan terjadi kesejahteraan di desa masing-masing.

Tiap desa pun sudah memiliki dokumen RPJMDes, RKPDes, dan dokumen penunjang lain guna kelancaran pelaksanaan dana desa. Secara keseluruhan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa selalu aktif memberikan informasi dan sosialisasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa ke masyarakat. Caranya adalah melalui rapat desa, sosialisasi di masing-masing Rukun Tetangga (RT), dalam kegiatan tahlil keliling, banner yang dipasang di beberapa lokasi, dan melalui perkumpulan lain yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan dana desa adalah aparatur desa sudah siap dengan adanya program dana desa, ditunjukkan dengan kepala desa mempersiapkan atau menyediakan staf yang menguasai teknologi informasi untuk mengelola dana desa. Adapun program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa terus dilakukan guna

kelancaran pelaksanaan dana desa. Di antaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur desa dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

## PEMBAHASAN

Problem dan tantangan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Batang adalah keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah. Masih sedikitnya aparatur desa yang 'melek' teknologi sehingga mengakibatkan beberapa aparatur desa harus merangkap pekerjaan. Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pengadministrasian atau laporan pertanggungjawaban menjadi kendala dalam pelaksanaan program dana desa tersebut, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semua pengolahan data menggunakan perangkat komputer dan berbasis teknologi informasi, walaupun di sisi lain pemerintah desa cukup terbantu dengan adanya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

Wasistiono dan Tahir dalam Tempati, dkk (2017:1441) menyatakan bahwa unsur kelemahan/keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintahan desa salah satunya adalah kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan bahwa sampai saat ini masalah yang dihadapi pemerintah desa adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dari aparatur desa akan mengganggu kinerja dari pemerintah desa itu sendiri.

Dana desa yang notabene program nasional dengan jumlah dana yang besar membuat pemerintah desa harus bekerja lebih optimal. Jumlah dana besar yang tidak dibarengi dengan kualitas sumber

daya aparatur desa tentu akan membuat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Apalagi di era saat ini semuanya berbasis data teknologi, poin tersebut harus menjadi titik perhatian bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu pemerintah desa.

Masih sedikitnya aparatur desa yang 'melek' teknologi sehingga mengakibatkan beberapa aparatur desa harus merangkap pekerjaan. Nyatanya, aparatur desa yang menguasai teknologi informasi diberi tugas untuk mengelola dana desa. Hal tersebut adalah konsekuensi dari program dana desa yang mengharuskan semua data baik perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban berbasis teknologi. Dampaknya adalah seringkali aparatur desa merangkap pekerjaan yang pada akhirnya menimbulkan tidak efektif dan efisien pada kinerja lembaga pemerintah desa.

Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pengadministrasian atau laporan pertanggungjawaban juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program dana desa. Dikemukakan oleh Subroto (2009:91) dalam penelitian Tesisnya yang berjudul "*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*" bahwa dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama.

Hasil penelitian memang mengungkapkan bahwa tidak banyak aparatur desa yang memahami pengelolaan dana desa, terlebih dalam hal pengadministrasian atau laporan pertanggungjawaban. Fakta yang diperoleh adalah walaupun hanya sebagian saja

aparatur desa yang memahami pengelolaan dana desa dan menguasai teknologi informasi, pemerintah desa tetap konsisten dan optimis melaksanakan program dana desa dengan sistem gotong royong, mulai dari membuat perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban.

Tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah desa adalah semua pengolahan data menggunakan perangkat komputer dan berbasis teknologi informasi. Pemerintah desa tentu tidak menutup mata dengan fakta yang ada bahwa hanya sebagian saja aparatur desa yang mampu atau menguasai perangkat komputer dan teknologi informasi. Melihat kelemahan tersebut, pemerintah desa selalu berupaya agar pelaksanaan dana desa terus berjalan guna mensejahterakan masyarakatnya dengan mengikutsertakan aparatur desa pada pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan dana desa sekaligus pelatihan teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan dana desa tersebut. Upaya-upaya yang demikianlah yang harus dilakukan agar pemerataan pembangunan tidak terhambat hanya karena masalah sumber daya aparatur desanya.

Fakta lain yang merupakan dampak positif adalah terjalinnya koordinasi dan tukar ilmu antara aparatur desa dengan pendamping desa. Hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan ilmu baru bagi aparatur desa berkaitan dengan bagaimana seharusnya pelaksanaan dana desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengimplementasikannya di lapangan. Dari sisi pendamping desa pun demikian, pendamping desa dituntut lebih sensitif dan peka terhadap pelaksanaan dana desa khususnya implementasi di lapangan dengan berbagai problem dan tantangannya.

Dampak positif berikutnya adalah adanya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah desa dengan warganya.

Pemerintah desa akan lebih sering bertemu dengan warganya, bermusyawarah, dan berjalan beriringan guna mewujudkan kesejahteraan di desa masing-masing. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya jumlah dana yang besar, desa berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk membuat desanya lebih maju. Mulai dari membangun infrastruktur penunjang perekonomian hingga pemberdayaan masyarakat.

Berikutnya adalah pemerintah desa satu sama lain lebih solid dengan adanya program dana desa karena mengemban tanggung jawab yang besar. Walaupun hanya satu atau dua perangkat yang dapat mengoperasikan perangkat komputer dan teknologi informasi, perangkat yang lain tidak serta merta hanya melihat saja. Tanggung jawab justru timbul karena diberi amanah yang lebih besar sehingga menimbulkan kesadaran dari setiap aparatur desa bahwa dana desa adalah tanggung jawab bersama dan harus dikerjakan secara bersama.

Lebih daripada hal tersebut di atas, dampak positif berikutnya adalah adanya tukar pikiran dengan desa di sekitarnya kemudian membentuk forum kerja sekretaris desa dan bendahara desa seperti yang terjadi di Desa Tersono. Forum-forum atas kesadaran sendiri seperti inilah yang akan membuat desa akan lebih cepat pertumbuhannya, baik dalam infrastruktur maupun perekonomian. Selain itu, Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) juga selalu dilakukan agar pelaksanaan dana desa dapat terus berlanjut dan mendapatkan *output* atau luaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan dana desa adalah aparatur desa sudah siap dengan adanya program dana desa, ditunjukkan dengan kepala desa mempersiapkan atau menyediakan staf



yang menguasai teknologi informasi untuk mengelola dana desa. Hasil penelitian tersebut mementahkan anggapan tahun sebelumnya oleh Basri dalam Ismail, dkk (2016:326) bahwa Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini.

Memang jika dibandingkan korelasi antara jumlah dana desa yang besar dengan kualitas sumber daya aparatur desa yang mayoritas masih rendah maka secara mentah akan beranggapan bahwa pemerintah desa tidak akan siap dengan adanya program dana desa tersebut. Di sisi lain, pemerintah desa dipaksa untuk mengelola dan melaksanakan dana desa yang begitu besar, maka dengan sumber daya manusia yang ada yang mampu dan menguasai perangkat komputer dan teknologi informasi, dana desa tetap berjalan hingga saat ini. Pemerintah desa pun siap dengan konsekuensi terus belajar dan mengembangkan potensi dari tiap-tiap aparaturnya.

Untuk saat ini, berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa, kepala desa mempersiapkan atau menyediakan staf yang menguasai teknologi informasi untuk mengelola dana tersebut. Tentu dampaknya adalah staf yang menguasai teknologi informasi tersebut akan merangkap pekerjaan. Pemerintah desa khususnya kepala desa menyadari betul bahwa perlu adanya peningkatan kualitas bagi perangkatnya. Dari beberapa desa yang dijadikan objek penelitian, ditemukan bahwa tiap tahun terdapat pelatihan-pelatihan bagi aparatur desa guna meningkatkan kualitasnya dan sebagai penunjang dalam kelancaran program dana desa. Selain itu juga dengan menjadi anggota forum tenaga administrasi, dan konsultasi dengan pendamping desa. Bintek terkait Siskeudes dan sosialisasi terkait program dana desa

juga dilakukan pemerintah kabupaten sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa yang ada di Kabupaten Batang.

Ada atau tidak adanya program dana desa, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa harus selalu dilakukan sehubungan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Terlebih sekarang ini transparansi anggaran sudah menjadi tren yang notabene sistem tersebut berbasis *online* atau internet. Bahwa di era sekarang semua data menggunakan perangkat komputer dan berbasis teknologi, maka dari itu aparatur desa harus dapat meningkatkan kualitasnya masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman.

Kesiapan aparatur desa dalam melaksanakan program dana desa juga ditunjukkan dengan sudah memilikinya dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, dan dokumen penunjang lain sehubungan dengan dana desa. Program yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan rencana pembangunan desa. Pemerintah desa selalu aktif memberikan informasi dan sosialisasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa ke masyarakat, baik melalui rapat desa, sosialisasi di masing-masing Rukun Tetangga (RT), dalam kegiatan tahlil keliling, *banner* yang dipasang di beberapa lokasi, dan melalui perkumpulan lain yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi ke masyarakat.

## **SARAN**

Bagi pemerintah desa, terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa sesuai dengan misi dan harapan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa. Perubahan paradigma mengenai perilaku dan pola pikir bagi setiap aparatur desa secara terus berkelanjutan dari pamong desa menjadi

pelayan publik/masyarakat desa. Bagi pemerintah kabupaten, menyediakan tenaga pendamping desa yang profesional dan memadai sesuai jumlah desa, untuk mendorong percepatan alih teknologi dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Terus mengintensifkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur desa secara komprehensif dan berkelanjutan dengan substansi materi yang tepat sasaran untuk pembenahan dan peningkatan tata kelola dana desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo. 2016. 'Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 2, Agustus 2016 Hal. 323-340. ISSN 1979-6471.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tempati, Riko, Rita Kala Linggi dan Budiman. 2017. 'Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung'. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 4 Hal. 1435-1446. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.